

BUMDes Harus Maksimal untuk Ekonomi Masyarakat

LIMBOTO-GP-Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan bisa memberikan kontribusi pada pendapatan desa terlebih bagi ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Demikian disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo dari Fraksi Golkar Arifin

Kilo, usai melaksanakan rapat fraksi perdana, Senin (4/1).

“Sumber daya manusia, kita punya. Tapi kok banyak laporan sejumlah BUMDes tidak lagi beroperasi, ada juga yang masih beroperasi namun belum memberikan kontribusi pada pendapatan desa,” kata Arifin. Padahal,

menurut dia alokasi dana desa yang dikucurkan pemerintah sangatlah besar. Semestinya dapat diimbangi dengan peningkatan pembangunan daerah tertinggal.

“Pemerintah ditingkat desa harus mampu mendorong penuh optimalisasi BUMDes

agar tujuan meningkatkan kesejahteraan desa bisa tercapai. Tidak boleh tidak, karena pihak desa yang diberikan wewenang penuh mengelola operasional BUMDes,” jelas Arifin. Ia menambahkan, menciptakan inovasi, kualitas pengelolaan harus benar-benar baik dan

benar, dan tidak bersikap pasif sehingga usaha yang dilakukan melalui BUMDes bisa lebih optimal. Politisi Golkar itu berharap, di tahun 2021 ini bisa tercipta pengelolaan BUMDes yang sehat agar mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan pendapatan desa untuk kesejahteraan

masyarakat. “Penguatan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan BUMDes sangat penting untuk kemajuan daerah, kita berharap pemerintah desa bisa menggunakan peluang yang ada ini dengan semaksimal mungkin demi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Arifin. **(wie)**



Arifin Kilo

2021 Program Harus Pro Rakyat

LIMBOTO-GP-Berbagai program pembangunan yang diusulkan masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), baik dari tingkat desa sampai kecamatan saat ini harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Mengingat dari tahap awal hingga penetapannya merupakan hasil dari program dan kegiatan yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat. Wakil Ketua DPRD Gorontalo Irwan Dai menjelaskan, sudah sepantasnya usulan pembangunan lebih memihak kepada masyarakat banyak.

Saat ini sudah tidak ada lagi kepentingan yang hanya menguntungkan pribadi. Namun, semua usulan harus transparansi dan memprioritaskan kelengkapan infrastruktur. “Kita melihat infrastruktur perlu dibangun terutama jalan dan fasilitas umum lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Semua usulan harus bersih dan tidak ada lagi yang namanya kepentingan, agar apa yang menjadi cita-cita kita bersama terwujud,” tegas politisi Golkar ini. Ia berharap, hasil bisa dijabarkan nanti dan masuk program kedepannya. **(wie)**



Irwan Dai



RAPAT-Suasana DPRD saat membahas rapat kerja DPRD setahun kedepan dan memprioritaskan aspirasi masyarakat.

BK Minta Aleg Jaga Komitmen Kerja

Kinerja Tak Boleh Kendor

LIMBOTO-GP-Masuk masa sidang tahun 2021 Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Eman Mangopa mengajak seluruh anggota tetap menjaga komitmen kerja serta aktif menjalankan tiga fungsi legislatif. “Pertama,

saya mengajak kepada seluruh anggota DPRD di awal tahun 2021 ini mari sama-sama menjaga komitmen kerja,” ujar Eman, Senin (4/1).

Ia memberi opsi agar kegiatan kerja anggota DPRD berjalan lancar seperti biasa meski ditengah situasi pandemi Covid-19. Dua hal itu yaitu, kerja tatap muka secara terbatas dan

rapat melalui virtual.

“Kita bisa mengusulkan kepada pimpinan DPRD, jika tidak dimungkinkan untuk rapat kerja secara tatap muka (terbatas) maka alternatif rapat secara virtual bisa dilakukan,” kata Eman. Sebab, menurut Eman banyak tugas anggota DPRD yang menanti untuk segera dapat diselesaikan, bahkan ada sejumlah

pekerjaan tertunda di tahun 2020. “Tugas kita masih banyak, untuk itu semangat kerja tak boleh kendor. Apapun rintangannya kita tidak boleh pasrah meski ditengah pandemi seperti sekarang ini,” tutur Eman.

Lebih dari itu, masyarakat pun diharapkan ikut aktif dalam mengawasi kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),

bukan hanya kinerja, masyarakat juga diharapkan ikut mengawasi perilaku mereka dan jangan segan melaporkan pelanggaran yang dilakukan anggota dewan.

“Kami juga mengajak masyarakat ikut mengawasi kerja anggota DPRD, demi kualitas kinerja yang lebih baik untuk daerah,” tutup Eman. **(wie)**

SAMBUNGAN ETALASE

Moeldoko: Nama Calon Kapolri Sudah Ada

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan nama calon Kapolri yang akan diajukan Presiden ke DPR RI sudah ada.

“Siapanya pasti sudah ada.

Kebetulan tidak di kantong saya,” kata Moeldoko di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan bahwa pergantian Kapolri sesuatu yang rutin dan prosedur serta

mekanismenya juga sudah ada.

Semuanya, menurut dia, tinggal menunggu waktu.

“Mekanisme jelas ada usulan, kemudian DPR akan

memproses. Berikutnya nanti keputusannya seperti apa. Saya pikir sampai di situ saja,” kata Moeldoko, dikutip ANTARA.

Sesuai dengan prosedur, nama-nama calon Kapolri akan

dikirimkan Komisi Kepolisian Nasional (Koppolnas) kepada Presiden.

Selanjutnya, Presiden akan memilih satu nama yang akan diajukan ke DPR untuk

menjalani uji kepatutan dan kelayakan. Penggantian Kapolri dilakukan karena Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis akan pensiun pada tanggal 1 Februari 2020. **(antara)**

Jatah Gorontalo Paling Kecil

dari halaman 1

“Mohon untuk dipahami bahwa meskipun vaksin sudah didistribusikan, akan tetapi penggunaan vaksin menunggu Izin Penggunaan Darurat/ EUA dari BPOM,” kata Head of Corporate Communication Bio Farma Iwan Setiawan lewat aplikasi percakapan, Senin (4/1) dilansir CNNIndonesia.

Iwan mengatakan bahwa vaksin Sinovac dalam bentuk produk jadi sudah tiba di Indonesia sejak 7 Desember lalu. Vaksin lalu didistribusikan pada 3 dan 4 Januari 2021.

“Pada tanggal 3 Januari 2021 dikirimkan ke 14 provinsi sejumlah 401.240 vial, dan tanggal 4 Januari 2021 ke 18 provinsi sejumlah 313.000 vial,” ujar Iwan.

Saat ini Indonesia sudah

memiliki 3 juta vaksin Covid-19 jadi buatan Sinovac. Vaksin ini datang dalam dua tahap. Pada 7 Desember 2021 sebanyak 1,2 juta dosis dan 1,8 juta dosis datang pada 31 Desember 2021.

Berdasarkan persentasi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, vaksin tahap awal akan diberikan kepada 1,3 juta tenaga kesehatan yang tersebar di 34 provinsi.

BELUM DITERIMA PEMDA

Meski Bio Farma menyatakan telah mendistribusikan vaksin Covid-19 kepada semua provinsi, tapi Pemerintah Provinsi Gorontalo mengaku belum menerima distribusi vaksin tersebut.

Kepala Seksi Penyakit menular Dikes Provinsi Gorontalo dr.

Irma Cahyani mengatakan pihaknya masih melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait penyaluran vaksin di Gorontalo. Pemerintah Kabupaten dan Kota di Gorontalo masih melakukan pendataan terkait penerima vaksin pada tahap awal. “Belum ada, masih melakukan persiapan di daerah dulu, baru akan dikirim” Ujar Irma, Senin (4/1). Hingga kini pemerintah provinsi Gorontalo masih menunggu hasil pendataan yang dilakukan kabupaten/kota.

Sebelumnya, Kepala Bidang Penyakit Menular Provinso Gorontalo, Reyke Uloli, mengatakan pihaknya merencanakan 7000 penerima vaksin di Gorontalo pada saat penyaluran. Penerima vaksin

diutamakan tenaga kesehatan diikuti TNI-POLRI, ASN di bidang pelayanan publik. Namun, tak semua target itu bisa langsung menerima vaksin. “Penerima harus sehat dan tidak ada penyakit bawaan, rentang umur 18-59 tahun,” katanya. Pemerintah masih terus melakukan pendataan, agar proses vaksinasi berjalan lancar. Reyke menambahkan, upaya sosialisasi menjadi kunci dalam keberhasilan vaksinasi di Gorontalo.

Sementara itu, Wakil Gubernur Idris Rahim, saat melantik Kadis Kesehatan Provinsi Gorontalo, dr. Yana Yanti Suleman, Senin (4/1) mengatakan, informasi pengiriman vaksin ke Gorontalo baru pada pertengahan Januari. Ia meminta Dikes menyiapkan infrastrukturnya, karena vaksin membutuhkan ruang pendingin khusus.

“Sesuai informasi, pertengahan Januari ini vaksin Covid-19 akan dibagikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Segera siapkan

wadah penyimpanannya, karena berdasarkan informasi vaksin ini harus disimpan dalam suhu delapan derajat celsius, termasuk data yang akan divaksin pertama,” tegas Idris.

Idris menambahkan, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 juga harus segera disosialisasikan kepada masyarakat. Dikatakannya, sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat agar obsesi pemerintah agar seluruh rakyat Indonesia bisa divaksin Covid-19 bisa terwujud. “Yang sangat penting adalah sosialisasinya kepada masyarakat, karena pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Kalau perlu sosialisasinya sampai ke warung-warung kopi,” ujar Wagub.

Terkaithal itu Kadis Kesehatan Provinsi Gorontalo, dr. Yana Yanti Suleman menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan wadah yang bisa memastikan

agar rantai dingin vaksin Covid-19 tetap terjaga. Yana menuturkan, rantai dingin vaksin harus dijamin karena vaksin membutuhkan suhu spesifik antara dua sampai delapan derajat celsius.

“Rantai dinginnya kita jamin agar pada saat penyutikan kepada sasaran dipastikan vaksinya dalam keadaan baik,” jelas Yana.

Lebih lanjut diutarakannya, Dikes Provinsi Gorontalo juga telah melakukan pendataan penerima vaksin. Berdasarkan arahan dari pemerintah pusat, sasaran penyuntikan pertama vaksin Covid-19 adalah tenaga kesehatan, setelah itu pekerja pelayanan publik lainnya.

“Sambil menyiapkan tenaga, kita masih menunggu berapa jumlah vaksin yang akan dikirim dan kapan waktu pelaksanaannya. Kita juga akan melakukan sosialisasi, karena banyak masyarakat yang belum mengetahui pentingnya vaksin ini,” tutup Yana. **(cnn/cnbc/tr69/tro)**

Silaturahmi, Gagas Kerja Sama

dari halaman 1

Taufan juga salut, media cetak pertama di Gorontalo ini, terus eksis kendati gempuran media sosial dan online. Kedepan kata dia, pihaknya akan menjalin kerjasama dengan media. Ia berharap sinergi dengan media, akan lebih menguatkan peran dua pihak.

Sementara itu, Direktur Utama Gorontalo Post, Mohamad Sirham, didampingi Wakil Direktur, Femmy Udoki dan Direktur Marketing Gorontalo Post, Hariyanto Hamzah, mengatakan, peran JNE sangat membantu masyarakat, terutama selama pandemi.

Pandemi kata Sirham, membuat orang hanya beraktivitas di rumah, sementara aktivitas belanja justeru tetap jalan, hal itu

membuat peran kurir sangat dibutuhkan. “Dan itu telah dijalankan dengan baik oleh JNE,” katanya. Ia menyambut baik kerjam sama dengan JNE, ia berharap kolaborasi ini akan saling menguntungkan.

DAMPAK PANDEMI

Sementara itu, Presiden Direktur JNE, Mohamad Feriadi Soeprapro, November 2020 mengatakan, sejak Covid-19 merebak, dan diberlakukan pembatasan sosial berskala besar, ikut berdampak untuk jasa pengiriman.

“Nah pada saat itu, aktivitas perkantoran berhenti, lalu pabrik juga menghentikan kegiatan produksinya. Ini memberikan dampak juga untuk kami di jasa pengiriman, tapi tidak berlangsung lama,” ujar Feriadi, dalam dalam 2021: It's Time to Win-

Back “Reimagine, Recover, Regain”, yang diselenggarakan oleh Inventure, Jakarta, (5/11/2020).

Menurutnya, kebijakan PSBB tersebut ternyata melahirkan perubahan pola belanja yang dilakukan konsumen. Untuk membantu pemerintah mengurangi dampak Covid-19, konsumen menjadi lebih sering belanja melalui online. Hal ini tentu saat dimanfaatkan oleh JNE untuk memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Penerapan PSBB menjadi tantangan tersendiri bagi JNE untuk terus meningkatkan pelayanan.

Kata dia, JNE berusaha memaksimalkan produk layanan atau fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan saat ini, misalnya digital payment, friendly logistic, dan sebagainya. **(tro)**

Opsi Batal Masih Dibuka

dari halaman 1

Affan merinci, skenario pertama yang telah disusun oleh pemerintah saat ini yakni tetap berangkat haji dengan kuota normal. Skenario kedua, berangkat dengan kuota 50 persen. “Dan skenario ketiga, batal kembali tidak memberangkatkan jemaah seperti tahun 2020,” kata dia.

Affan menilai penyelenggaraan haji pada tahun 2021 akan berbeda dengan penyelenggaraan haji sebelumnya. Sebab tantangan dan realitas penyelenggaraan haji 2021 cukup besar karena

digelar di tengah kondisi pandemi.

Terkait dengan ketiga skenario ini, sambung dia, pemerintah menyatakan, sudah sangat siap untuk menjalankannya. Meski demikian, ia menyatakan apakah masyarakat siap dengan skenario yang telah disusun tersebut. “Ini kita hadir untuk menyatukan apakah kita siap dengan skenario tersebut yaitu untuk kita siap dan bersiap diri untuk melaksanakannya. Sebab, pelaksanaan haji 2021 tentu tidak sama dengan pelaksanaan haji di masa normal,” kata dia.

Sampai saat ini, pihak

Kerajaan Arab Saudi belum membuka sinyal untuk membuka kembali ibadah haji pada tahun 2021.

Atas pembatalan itu, Kemenag memberikan prioritas bagi para jemaah haji tahun 2020 atau 1441 Hijriah untuk pada berangkat tahun ini bila ibadah haji dibuka oleh Saudi.

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memutuskan tetap menggelar haji di masa pandemi dalam jumlah terbatas, yakni 1.000 orang saja pada tahun 2020. Indonesia sendiri tercatat batal mengirim sebanyak 221 ribu jemaah haji pada tahun lalu. **(cnn)**